



## Walikota Proyeksikan Pendapatan APBD 2020 Rp 1,7 Triliun

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta memproyeksikan pendapatan dalam APBD 2020 mencapai sekitar Rp 1,7 triliun. Ada tujuh prioritas pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun depan yang menjadi dasar dalam penyusunan keuangan daerah di APBD 2020.

Hal itu disampaikan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti saat membacakan nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2020 dalam rapat paripurna Rabu (2/10). Rencana pendapatan itu berasal dari pendapatan asli daerah Rp 683,8 miliar, dana perimbangan Rp 897,8 miliar dan pendapatan lain-lain yang sah Rp 181 miliar. "Untuk anggaran belanja daerah dalam APBD 2020 Rp 1,89 triliun. Terdiri atas belanja tidak langsung Rp 775,6 miliar dan belanja langsung Rp 1,12 triliun. Jadi defisit Rp 136,3 miliar. Untuk menutup defisit anggaran akan dilakukan pembayaran netto," kata Haryadi dalam rapat paripurna tersebut.

Nota pengantar itu menjadi dasar untuk pembahasan APBD 2020 antara Pemkot Yogyakarta dan DPRD setempat. Dalam kesempatan itu Walikota juga menyampaikan nota kesepakatan antara Pemkot dengan DPRD Kota Yogyakarta terkait pelaksanaan kegiatan tahun jamak berupa pembangunan gedung unit XI kompleks Balaikota.

Haryadi menyebut tujuh prioritas pembangunan Kota Yogyakarta tahun depan adalah pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur, pelestarian lingkungan dan pemanfaatan ruang serta pematapan kinerja aparatur dan birokrasi. "Yang paling penting ke depan pada pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia aparatur serta masyarakat. Pembangunan kegiatan ekonomi dan pemerataan karena tahun depan akan banyak berubah seperti penataan Stasiun Tugu, pedestrian Malioboro dan lainnya," terang Haryadi.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiarmoko mengatakan, dalam rapat paripurna kemarin sudah ditetapkan keanggotaan alat kelengkapan dewan seperti Badan Anggaran (Banggar). Namun belum ada penetapan pimpinan alat kelengkapan dewan. Meski demikian hal itu tidak masalah karena pimpinan banggar juga melekat pada pimpinan dewan. "Setelah ini keanggotaan Banggar akan mengadakan rapat internal untuk menindaklanjuti nota pengantar KUA PPAS yang disampaikan walikota," ujar Danang. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005